

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKU UMKM BERBASIS “DIGITAL”
(Studi Pada Program Edukasi Pemasaran Usaha Oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mojokerto)**

Emilda Roudah Salsabilla

Program Studi Adminstrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
emildasalsabilla557@gmail.com;

Dida Rahmadanik

Program Studi Adminstrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didarahma@untag-sby.ac.id;

M.Kendry Widiyanto

Program Studi Adminstrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
kenronggo@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program pelatihan edukasi pemasaran usaha oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto terhadap pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan di Kantor Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Adapun teknik pengambilan data ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu program penelitian berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang sangat baik bagi pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto. Implementasi kebijakan yang diterapkan Diskominfo Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi tiga indikator implementasi kebijakan yang ideal.

Kata kunci: *Kebijakan, Pelatihan, Pelaku UMKM*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of business marketing education training program policies by Diskominfo Mojokerto Regency towards MSME actors. The implementation of this research activity was carried out at the Mojokerto Regency Diskominfo Office. The data collection technique was obtained through interviews and observation. The results obtained in this study are that the research program is running well and has a very positive impact on MSME actors in Mojokerto Regency. The implementation of the policies implemented by Diskominfo in Mojokerto Regency has fulfilled three indicators of ideal policy implementation.

Key words: *policy, training, MSME actors*

A. PENDAHULUAN

Secara umum UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Aryani, 2020). Namun di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut menyatakan bahwa, UMKM adalah usaha produktif milik orang/perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya, salah satunya dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional (Linwistin et al., 2022)

Akan tetapi, semenjak Tahun 2020 pandemi Covid-19 masih tergolong salah satu bencana yang terjadi di seluruh dunia terutama di Indonesia. Bahkan sampai saat ini Covid-19 masih tetap menjadi tren topik pembahasan di berbagai medi. Sejak covid-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan banyak kebijakan antara lain menjaga jarak ditempat keramaian dan penetapan PSBB (Muzdalifah et al., 2020). Bahkan dampak tersebut berdampak juga kepada setiap Kabupaten di Indonesia, terutama di Kabupaten Mojokerto. Ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen dibandingkan tahun 2020.

Digitalisasi merupakan ide baru dan peluang besar dalam membantu penjualan usaha. Dapat dikatakan bahwa digitalisasi merupakan bentuk kemudahan pelayanan yang lebih mudah, dan efektif. Penggunaan digitalisasi dalam perekonomian juga membentuk kemudahan dalam transaksi pada berbagai aspek sehingga tidak sedikit sektor usaha yang berubah ke perekonomian digital (Aryani, 2020). Untuk bisa memulihkan perekonomian para pelaku UMKM, maka dari itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih handal dalam meminimalisir terjadinya krisis perekonomian tersebut (Muzdalifah et al., 2020). Salah satunya dengan dibutuhkan sumber daya manusia yaitu pelaku UMKM yang *professional* dan maju. Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 027/15051/022.1/2022 tentang pelaksanaan program Jatim Bejo guna untuk mendukung pertumbuhan UMKM termasuk membantu pelaku UMKM. Didalam kebijakan tersebut pemerintah membuat program berupa Jatim Bejo yaitu internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Optimalisasi Pemanfaatan *E-marketplace* dalam bentuk Toko Daring sebagai upaya peningkatan peran serta Pelaku UMKM dan Transparansi serta Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan diwakilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menggelar program edukasi pemasaran digital yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (detik.com,2022). Program edukasi ini di gelar di aula hotel ayola Jalan Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. Yang diselenggarakan

selama dua hari, yakni 21-22 Maret 2022, dengan diikuti sebanyak 100 pelaku UMKM. Para pelaku UMKM tersebut akan mendapatkan bimbingan teknis dari para akademisi, praktisi wirausaha, perbankan dan Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto. Materi pelatihan meliputi dasar pengelolaan keuangan, aplikasi pengelolaan keuangan, dasar digital marketing, akses modal, serta digipreneur naik kelas dan go digital (detik.com,2022).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh kelompok aktor politik atau seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta dengan cara-cara untuk mencapainya. Keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Wahab, 2004). Sebagai salah satu komponen utama negara, kebijakan publik dapat diartikan instrumen yang digunakan pemerintah sebagai policy maker untuk mengelola, mengatasi, dan mengendalikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah warganya. Di sinilah terlihat urgensi dari kebijakan publik itu sendiri. Kemudian, kebijakan publik juga sebagai jalan mencapai tujuan bersama dan cita-cita dari sebuah negara (Nugroho, 2014).

Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan menurut Howlet et al (1995) dikutip oleh Subarsono (2012) yaitu suatu proses melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Akib, 2008). Dalam implementasi suatu kebijakan akan dinilai siapakah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut bagi lingkungan (Subarsono, 2012).

Teori Implementasi

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (Wibawa 1994)

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.

- d. (Siapa) pelaksana program.
 - e. Sumber daya yang dihasilkan
- Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
 - c) Kepatuhan dan daya tanggap.

C. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menurut (Moelong,2014) ialah penelitian memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Dengan cara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa., pada suatu lingkup khusus menggunakan beberapa metode alamiah. Penelitian kualitatif mampu menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaranyang mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang bisa diamati dalam suatu lingkup tertentu yang dilihat dari sudut pandang yang komprehensif (Moleong, 2014).

Menurut Moleong (2014) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah (Moelong,2014). Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Edukasi Pelaku UMKM berbasis digital, oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 027/15051/022.1/2022 berupa pelaksanaan program Jatim Bejo. Dengan berfokus terhadap tiga perspektif keberhasilan yakni; perspektif kepatuhan, perspektif kelancaran dan perspektif kepuasan.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Peneliti tertarik untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi penelitian didasarkan pertimbangan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto yang mengadakan program edukasi digital untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Mojokerto.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang Kebijakan Program Edukasi dan Pemasaran Pelaku UMKM Berbasis Digital di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen mengenai Program edukasi pemasaran usaha oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sesuai dengan peraturan dari Gubernur Jawa Timur nomor 027/15051/022.1/2022 berupa pelaksanaan program Jatim Bejo.

Satori Dham'an dan Komariah Aan (2012) dalam Ufie (2013) menjelaskan bahwa observasi adalah melakukan pengamatan langsung objek guna mengetahui tentang situasi, keberadaan objek, konteks dan makna saat pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati secara langsung objek penelitian dan mencatat yang berkaitan dengan Program Edukasi dan Pemasaran Pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto.

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu terdiri dari pihak pewawancara dan terwawancara. Pihak pewawancara (*interviewer*) adalah seseorang yang memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara adalah seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. (Moleong,2014). Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian-bagian yang terlibat dalam Program Edukasi dan Pemasaran Pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang akan dikumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen terkait Program Edukasi dan Pemasaran Pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto.

Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi data-data atau catatan yang terdapat di lapangan yaitu deskriptif dan refleksi. Catatan deskriptif merupakan catatan alami, catatan mengenai sesuatu yang di dengar, disaksikan, dilihat dan yang peneliti alami tanpa ada asumsi atau tafsiran yang bersumber dari peneliti perihal suatu fenomena yang telah dialami.

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa penting, merangkum, serta membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Dalam penelitian ini nantinya akan dibuat ringkasan awal hasil dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang sudah ditentukan serta akan memfilter beberapa temuan pada penelitian yang berlangsung di lapangan.

Dalam penyajian data bisa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Data yang disajikan dalam penelitian ini ialah data dalam bentuk kata-kata dan tabel. Untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data dan informasi terkait Program Edukasi dan Pemasaran Pelaku UMKM Kabupaten Mojokerto oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto.

Pada tahapan ini data yang sudah diperoleh dari tahap tahap sebelumnya adalah peneliti membuat kesimpulan dari data atau informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian. Bahan atau data yang diperoleh disimpulkan dan memfokuskan pada inti dari permasalahan dengan menarik kesimpulan. Data yang disimpulkan didukung dengan bukti yang kuat, kesimpulan ialah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diangkat dari awal oleh peneliti.

D. PEMBAHASAN

Program Edukasi digital merupakan program yang dibuat oleh Kementrian Kominfo untuk membantu para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha mikro. Program edukasi tersebut dijalankan dan dibantu oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto yang bertanggung jawab untuk membantu menjalankan pengenalan digital terhadap pelaku UMKM. Pelatihan tersebut dibagi menjadi beberapa level, dan peserta akan mempelajari setiap level tentang pemanfaatan digital selama 13 jam pelatihan (2 hari), yang dapat memudahkan kegiatan usaha

bisnis sehari-hari dengan metode penyampaian materi, praktik, serta diskusi tanya jawab. Bahkan, dibeberepa pelatihan dilengkapi dengan pendampingan oleh pengajar sampai maksimal 28 hari untuk memberi kesempatan pada peserta agar mencapai yang ditargetkan. Informasi yang didapat peneliti mengenai program edukasi digital (*IT*) merupakan data berupa dokumen yang diberikan oleh pihak Diskominfo kepada peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan yang ideal menurut Ripley (2014) untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan sudah berhasil memenuhi kriteria dalam konsep implementasi kebijakan tersebut. Indikator atau kriteria yang digunakan untuk mencapai konsep implementasi kebijakan yang ideal adalah (a) kepatuhan, (b) kelancaran, (c) kepuasan.

Kepatuhan

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dilihat dari output (hasil kerja) atas kepatuhan dari kebijakan yang diberlakukan, panitia/pegawai Diskominfo Kabupaten Mojokerto dapat menganalisis bahwa para panitia dan jajaran pegawai baik pelayanan maupun pelaksana sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan sangat baik terhadap kebijakan dari program pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Dengan program yang diberikan berupa materi, pembinaan serta praktek lapangan yang diselenggarakan selama dua hari sudah dijalankan dengan baik sesuai waktu dan SOP yang ditentukan. Hasil dari kegiatan dalam kepatuhan kebijakan tersebut yaitu dapat membantu para pelaku UMKM setiap daerah masing-masing, serta dapat memberikan perubahan terhadap kualitas kehidupan berupa pengembangan usaha yang didapatkan oleh pelaku UMKM. Melalui kegiatan edukasi pemasaran oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto, penerima edukasi dibimbing langsung dalam penggunaan *marketplace* baru berupa *Digital Entrepreneurship Academy* (DEA). Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Mojokerto juga sudah baik dalam membantu pelaku UMKM mengenal pemasaran usaha online.

Kelancaran

Dari hasil penelitian berupa wawancara kepada pegawai yang bertugas di program edukasi pemasaran usaha oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto bahwa implementasi kebijakan yang diberikan oleh para pegawai pelaksana dalam menjalankan pelatihan sudah dilaksanakan dengan lancar dan baik. Para pegawai/panitia yang bertugas bekerja sangat kompak dalam menjalankan program, dimulai dari penyaringan peserta yang bisa mengikuti pelatihan. Para panitia yang bertugas terbagi dalam beberapa divisi dan tugas serta terlihat hampir semua panitia yang bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan masing-masing. Ketika pendaftaran program edukasi ini dibuka, bagian pendaftaran mengumumkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para calon peserta. Pada bagian identifikasi panitia sudah bekerja dengan baik dalam melakukan pemilihan peserta, sehingga para peserta tidak merasa kesulitan. Untuk kelancaran waktu pelatihan juga sudah diberikan dengan sangat baik oleh para peserta dan panitia, sehingga bisa selesai sesuai dengan susunan acara tanpa ada penambahan maupun pengurangan waktu.

Kepuasan

Dalam tahap ini adalah mengenai kepuasan dalam implementasi kebijakan

yang diberikan dengan melihat dua sisi dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto selaku panitia pelatihan serta pelaku UMKM selaku peserta pelatihan. Tindaklanjutan yang diberikan oleh panitia selama pelatihan yang diselenggarakan memang tidak ada kendala yang serius. Namun ada satu kendala dalam pelaksanaan program kemarin, yaitu tempat yang disediakan tidak sesuai dengan arahan Bupati Mojokerto yang seharusnya tempat pelatihan dilaksanakan disatu lingkup daerah Kabupaten Mojokerto, akan tetapi tempat pelatihan kemarin dilaksanakan di daerah Kota Mojokerto. Untuk kepuasan implementasi yang diberikan Diskominfo Kabupaten Mojokerto terhadap pelaku UMKM yaitu baik sekali. Pelaku UMKM merasa sangat terbantu atas kegiatan ini, karena membantu pengembangan usaha yang berjalan.

E. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan melalui program edukasi digital pemasaran usaha terhadap pelaku UMKM yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto dimana pihak Diskominfo yang menjadi peran utama dalam program edukasi digital ini. Upaya yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan kebijakan sebelumnya tentang program digital untuk pelaku UMKM.
2. Memberikan pengertian berupa materi selama dua hari serta bimbingan pencapaian target selama 20 hari.
3. Melancarkan serta membimbing peserta/pelaku UMKM selama acara berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, A. F. (2020). Optimalisasi Creative Digital Marketing Dan E- Commerce Sebagai Strategi Bisnis Bagi Pelaku Umkm Terdampak Covid-19 Optimalisasi Creative Digital Marketing Dan E- Commerce Sebagai Strategi Bisnis Bagi Pelaku Umkm Terdampak Covid-19. *Jurnal Bisnis Strategi, December*.
- Linwistin, L., Erwin, E., Syahrir, N., & Azis, A. (2022). Kekayaan Sumber Daya dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Umkm Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 1–7.
- Muzdalifah, L., Novie, M., & Zaqiyah, S. (2020). Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju UMKM Go-Digital di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal Bagi Pelaku UMKM Sidoarjo. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 2200–2208.
<https://www.jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/296>